

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP *Tahun* **2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Ahmad Dahlan No.1, Telp.(0322) 321168



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN**



SEGENG WIDODO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681219 198903 1 004

D

aftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. DATA UMUM ORGANISASI	13
1. Personil	15
2. Sarana dan Prasarana	17
3. Pembiayaan	27
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	54
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	56
A. RENCANA STRATEGIS	56
1. Tujuan	58
2. Sasaran dan Indikator Sasaran	59
B. RENCANA KINERJA TAHUN TAHUN 2024	59
Program dan Kegiatan	60
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	62
A. Capaian Kinerja Organisasi	62
A.1 Pencapaian Kinerja	62
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	63
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	63
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional ..	64

A.5	Analisa Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	64
A.6	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
A.7	Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja	65
B.	Realisasi Anggaran	70
BAB IV	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	72

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Lampiran lainnya (penghargaan, inovasi dll.)

I khtisar Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama Tahun 2024 dan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu “**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan** “ dan misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi yang ke-5, yaitu : **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**, Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan visi misi di atas adalah : Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik governance (e-GOV).

Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah : Meningkatnya implementasi e-GOV, Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berikut adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024

Meningkatnya implementasi e-GOV, indikator kinerjanya adalah :

1. Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi : 63%
2. Nilai SAKIP Diskominfo : 87.79

Pendahuluan

BAB 1

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, reformasi birokrasi sudah merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan. Pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur bisa juga diartikan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, menyempurnakan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif

Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi adalah interaksi pemerintah dan masyarakatnya yang dilakukan secara elektronik (digital), meliputi interaksi secara digital dalam pemerintahan yang baik, informasi dan komunikasi dan rekayasa ulang ketatalaksanaan pada setiap tingkatan pemerintahan. Peran teknologi informasi dalam reformasi birokrasi biasa disebut juga dengan e-GOV yaitu suatu upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

Guna mengukur sejauh mana penerapan e-GOV di suatu instansi pemerintah, khususnya kantor pengolahan data elektronik, maka dibuatlah laporan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap membandingkan perencanaan (target) dan hasil yang dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Diskominfo mempunyai tugas Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika serta persandian dan statistik.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas DISKOMINFO juga menjalankan fungsi-fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-government
- b. perencanaan teknis program kerja bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik
- c. pembinaan teknis program kerja bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-government
- d. pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- f. pembinaan ketatausahaan dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Uraian Tugas Masing - Masing Jabatan dalam Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, dan asset, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- 2) penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 4) penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- 7) penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- 8) penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- 9) penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKJIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- 10) penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 11) penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Sub Bagan Keuangan,

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan penyusunan program kena Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (2) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- (3) melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- (4) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- (5) melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- (7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- (8) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- (1) melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- (2) melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- (3) melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- (4) melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- (5) melaksanakan verifikasi keuangan;

- (6) melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- (7) melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- (8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;
- (9) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- (1) melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- (3) melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- (4) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, kemandirian dan keamanan kantor;
- (5) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
- (6) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- (7) melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- (8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
- (9) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik *mempunyai fungsi :*

- 1) penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi pelayanan informasi publik;
- 2) perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
- 3) pemantauan proses pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- 4) penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- 5) penyelenggaraan koordinasi hasil pengolahan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait;
- 6) penyelenggaraan koordinasi pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- 7) penyelenggaraan koordinasi pengelolaan saluran komunikasi media publik;
- 8) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media publik;
- 9) perumusan pola pembinaan pelayanan informasi dan komunikasi publik;
- 10) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
- 11) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

- a) Seksi Manajemen Informasi dan Komunikasi Publik;
- b) Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- c) Seksi Media Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Seksi Manajemen informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Manajemen Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional monitoring informasi dan pengelolaan konten resmi Pemerintah Daerah;
- (2) menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan monitoring informasi media;
- (3) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyampaian informasi melalui media online resmi Pemerintah;

- (4) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk identifikasi hasil pemantauan yang perlu ditetapkan sebagai agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- (5) melaksanakan pengelolaan website, email resmi Pemerintah Daerah;
- (6) melaksanakan pengelolaan media online pengaduan masyarakat;
- (7) melaksanakan pengelolaan dan publikasi informasi publik;
- (8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Komunikasi Publik

Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber daya komunikasi publik;
- (2) menyiapkan bahan perumusan teknis sumber daya komunikasi publik;
- (3) menyiapkan bahan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya komunikasi publik;
- (4) menyusun program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan informasi publik melalui kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat;
- (5) menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik;
- (6) menyiapkan bahan pelatihan dan pendarapan untuk peningkatan kapasitas bagi anggota Kelompok Informasi Masyarakat;
- (7) melaksanakan pembinaan dan pendampingan Pejabat Pengelola Informasi Daerah pembantu;
- (8) melakukan Kerjasama dengan media bk cetak maupun online terkait pemberitaan di Daerah;
- (9) menyelenggarakan dokumentasi untuk setiap peristiwa, kegiatan, atau acara penting yang terjadi di Daerah;
- (10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Media Publik

Seksi Media Publik, mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendayagunaan media komunikasi publik;
- (2) melaksanakan program kegiatan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendayagunaan media Publik;
- (3) melaksanakan kegiatan penyiaran, pertura, kernitraan media;
- (4) melaksanakan pengelolaan Radio Pemerintah Daerah dan Media Center;
- (5) melakukan pengelolaan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah;
- (6) menyebarluaskan informasi positif yang berkaitan dengan Daerah;
- (7) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)

Bidang Aplikasi Informatika adalah unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aplikasi Informatika, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Aplikasi Informatika.

Bidang Aplikasi Informatika *mempunyai fungsi :*

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Aplikasi Informatika;
- 2) Penyusunan program kegiatan Aplikasi Informatika;
- 3) Perumusan kebijakan penyusunan norma standar prosedur, fasilitasi, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi layanan publik e-Government;
- 4) Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan aplikasi informatika
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :

- a) Seksi Tata Kelola dan pemberdayaan TIK;
- b) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
- c) Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK

Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan pedoman/ kebijakan serta pemantauan, evaluasi di bidang teknologi informasi komunikasi:
- (2) melaksanakan perencanaan tata — kelola informatika untuk menata proses, sekaligus memasukan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun Rencana Induk Teknologi Informatika dan Komunikasi yang mendukung ekosistem kota cerdas:
- (3) mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi Rencana Induk yang mendukung ekosistem kota cerdas,
- (4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas:
- (5) melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan dalam menyusun rancangan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah,
- (6) melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia guna meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan di bidang teknologi informasi,
- (7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Aplikasi dan Integrasi sistem informasi;
- (2) melakukan penyiapan bahan pengajuan persyaratan nama domain instansi beserta hostingnya;
- (3) melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pengelolaan, evaluasi dan monitoring bagi nama domain instansi beserta sub domainnya;

- (4) melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan penyusunan rancangan operasional pembangunan dan pengembangan aplikasi mendukung sistem informasi manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (5) melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan aplikasi yang terintegrasi dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melalui media intranet dan internet sebagai langkah untuk mewujudkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi;
- (6) melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta inovasi di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi dengan menerapkan sistem informasi terintegrasi pada pembangunan dan pengembangan daerah yang tertinggal di bidang Teknologi Informasi;
- (7) memberikan rekomendasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem informasi pada instansi Pemerintah Daerah;
- (8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK

Seksi Infrastruktur TIK, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi;
- (2) melaksanakan pengelolaan jaringan internet dan internet Pemerintah Daerah;
- (3) melaksanakan pengelolaan Data Center dan Comand Center;
- (4) memberikan rekomendasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur — Teknologi Informatika dan Komunikasi seperti Hardware pada instansi Pemerintah Daerah;
- (5) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi;

(6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian adalah unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi di Daerah

Bidang Statistik dan Persandian *mempunyai fungsi* :

- 1) perumusan kebijakan teknis operasional bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 2) penyelenggaraan rencana kerja bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 3) penyelenggaraan rencana kerja bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 6) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :

- a) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
- b) Seksi Pengolahan Data dan Statistik
- c) Seksi Sumber Daya Statistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas

- (1) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

- (2) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah ;
- (3) menyiapkan bahan koordinasi , sinkronisasi dan fasiltasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan dan penguatan persandian dan keamanan informasi;
- (4) menyiapkan bahan pelaksanaan jaringan persandian;
- (5) melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, petatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- (6) melaksanakan pengelolaan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi;
- (7) melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan
- (8) komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Data dan Statistik

Seksi Pengolahan Data dan Statistik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, klasifikasi, verifikasi dan stratifikasi data statistik sektoral;
- (2) melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral;
- (3) melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan data statistik sektoral ;
- (4) membangun meta data statistik;
- (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Statistik

Seksi Sumber Daya Statistik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya statistik sektoral;

- (2) menyiapkan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan statistik sektoral;
- (3) melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- (4) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan sumber daya statistik;
- (5) melaksanakan bimbingan teknis dan supervise terkait layanan statistik sektoral;
- (6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber daya statistik sektoral;
- (7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman.

Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya. Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya *Good Governance*. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan,

DISKOMINFO juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa aplikasi pada 2017. Aplikasi-aplikasi tersebut diwujudkan :

- Aplikasi GIS Proyek
- Aplikasi Integrasi e- Planning, e-budgetting dan e-controlling
- Aplikasi Pelaporan Absensi Online
- Aplikasi Portal Smart City / Silly
- Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan
- Aplikasi Sistem informasi Statistik

Sedangkan pada tahun 2018 telah disusun dan dikembangkan beberapa aplikasi/software antara lain:

1. Aplikasi Smart City
2. Upgrade Aplikasi Pelaporan Absensi
3. Aplikasi e-Aperkat (Aplikasi Pelaporan Program dan Kegiatan Terpadu Elektronik)

Pada 2019, pengembangan aplikasi diutamakan dalam hal pengintegrasian aplikasi, sampai akhir 2019, aplikasi-aplikasi yang telah terintegrasi, adalah: 1. E-planning dengan e-budgeting, 2. Siapman dengan e-performance, 3. Paten, E-PBB, Perzela, RSUD, Dinkes dengan Disduk Capil.

Pada **tahun 2020**, aplikasi yang telah terintegrasi, adalah: lamongan store, lamongan tourism, warla yang masing-masing terintegrasi dengan aplikasi silala.

Dilanjutkan di tahun **2021**, dikembangkannya aplikasi SIAPMAN menjadi versi 2.0 dengan banyak fitur baru diantaranya terkoneksi dengan mesin absensi secara online dan real time, fitur kalkulasi presentase kehadiran dan pengurangan TPP, serta fitur notifikasi melalui telegram admin. Diintegrasikannya aplikasi sioppah (Sistem Online Pemantauan Produk Hukum) dengan aplikasi silala.

Di tahun **2022** telah dikembangkan beberapa aplikasi, antara lain:

1. Rumah Pelayanan Publik (lamongankab.go.id)
2. Portal Sistem Informasi Layanan (silala.lamongankab.go.id)
3. Aplikasi versi Android (SIAPMAN)

Pada tahun **2023** ini telah dikembangkan beberapa aplikasi, antara lain:

1. Manajemen Layanan SPBE
2. Knowledge Management System
3. Dashboard Eksekutif

Pada tahun 2024

1. Pengembangan Aplikasi Panel Harga Lamongan (PAHALA)

Pengembangan meliputi : Pengembangan core dari bahasa pemrograman (PHP) versi 5 ke versi 7, Upgrade database dari mysql ke mariadb, Perbaikan masalah (bug), Peningkatan keamanan, Peningkatan User Interface.

2. Pengembangan Aplikasi Sistem Integrasi Absensi Pegawai dengan e-Performance (SIAPMAN) meliputi: Optimalisasi Laporan Bulanan, Penambahan Fitur Filter Pegawai Laporan Bulanan, Penambahan Fitur Rincian Laporan Bulanan, Penambahan Fitur Filter Tahun Pada Hari Libur, Penambahan Fitur Filter Instansi Pada Lokasi Absen, Penambahan Fitur Hapus Otomatis Lokasi Absen Lama, Perbaikan Masalah (Bug).

3. Mandala Mobile

Mengimplementasikan satu data Kabupaten Lamongan dalam platform mobile android.

4. Online Survey

Melaksanakan tugas sebagai walidata dalam proses pengumpulan data dengan memberikan fasilitas pengumpulan data secara online sebagai upaya efisiensi.

5. Mandala CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network)

Pemenuhan kebutuhan interoperabilitas data yang ada pada satu data Lamongan untuk dibagi pakaikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan satu data tingkat Pusat (BAPPENAS).

6. Geoportal

Melaksanakan tugas sebagai walidata dalam proses pengumpulan dan penyebarluasan data spasial yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

7. Tanya-Mandala

Mengimplementasikan artificial Intelligence pada satu data Kabupaten Lamongan.

Berikut adalah gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan.

1). **Personil**

Jumlah personil dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan sebanyak 52

orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	28 orang	(51.85%)
2	CPNS	2 orang	(3.70%)
3	Honorer	24 orang	(44.44%)
Jumlah		54 orang	(100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	9 orang	(30%)
2	Jabatan Fungsional Tertentu	9 orang	(30%)
3	Jabatan Fungsional Umum	10 orang	(33.33%)
4	CPNS	2 orang	(6.66%)
Jumlah		30 orang	(100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.b	1 orang	(3.33%)
2	Eselon III.a	1 orang	(3.33%)
3	Eselon III.b	3 orang	(10%)
4	Eselon IV.a	11 orang	(36.66%)
5	Staf	14 orang	(46.66%)
Jumlah		30 orang	(100%)

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

No.	Golongan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV	5 orang	(9.25%)
2	Golongan III	20 orang	(37.03%)
3	Golongan II	4 orang	(7.40%)
4	Golongan I	1 orang	(1.85%)
5	Honorer	24 orang	(44.44%)
Jumlah		54 orang	(100%)

e. Komposisi Pendidikan PNS/CPNS :

No.	Pendidikan PNS/CPNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	1 orang	(3.33%)
2	SMA	2 orang	(6.66%)
3	D3	2 orang	(6.66%)
4	D4/S1	18 orang	(60%)
5	S2	7 orang	(23.33%)
Jumlah		30 orang	(100%)

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :

No.	Pendidikan Honorer	Jumlah	Prosentase
1	D3	2 orang	(8.34%)
2	S1/D4	16 orang	(66.66%)
3	SMA	6 orang	(25%)
Jumlah		24 orang	(100%)

g. Data pegawai menurut Gender :

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	40 orang	(74%)
2	Perempuan	14 orang	(26%)
Jumlah		54 orang	(100%)

2). Sarana dan Prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DISKOMINFO telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasarana perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

JUMLAH ASSET DINAS KOMINFO KAB. LAMONGAN

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	1	Bidang	Sertifikat BPKAD
2.	Alat-alat berat	1	Buah/set	Genset
3.	Alat-alat angkutan	12	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
4.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Buah	Las Listrik
5.	Alat kantor dan rumah tangga	986	Buah	Barang-barang inventaris
6.	Alat studio dan komunikasi	144	Buah	Kamera, Kamera Drone, DVD, Rig, LED Televisi (Video Wall System) dll
7.	Alat-alat laboratorium	-	-	-
8.	Bangunan gedung	3	Buah	DISKOMINFO, Puskom Kreatif, Radio Suara Lamongan
9.	Jaringan	70	Buah	Jaringan internet
	Jumlah	1192		

**JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN**

NO.	NAMA APLIKASI	FUNGSI APLIKASI	JUMLAH	ONLINE/OFFLINE
1.	PC. Client untuk DISKOMINFO	1	Unit	CPU Clint Server
3.	Router	139	Unit	Pembagian line internet
4.	Server	10	Unit	Induk server
5.	PC. Client Seksi	3	Unit	CPU internet untuk 3 Seksi
6.	PC. Client Tata Usaha	1	Unit	CPU Staf DISKOMINFO
8.	PC. Client untuk Staf	23	Unit	CPU staf DISKOMINFO
9.	Laptop	31	Unit	Laptop di DISKOMINFO
10.	PC Client di Puskom Kreatif	13	Unit	CPU untuk pelatihan
11.	Wavelan	7	Unit	Wifi internet
12.	Unit Power Supply	42	Unit	DISKOMINFO
13.	Jaringan Komputer	1	Unit	DISKOMINFO
14.	HDD External	1	Unit	DISKOMINFO
15.	CERTIFIKAT SSL	2	Unit	DISKOMINFO
16.	PC. Unit	45	Unit	DISKOMINFO
17.	Anti virus Windows server	1	Unit	DISKOMINFO
18.	Main Frame	2	Unit	DISKOMINFO
19.	Rackmount	25	Unit	DISKOMINFO
20.	Firewall Server	2	Unit	DISKOMINFO
21.	Antivirus email server	1	Unit	DISKOMINFO
22.	Note Book	7	Unit	Note book Diskominfo
23.	PC ALL IN ONE	1	Unit	PC Diskominfo

24.	Mesin Absensi	257	Unit	DISKOMINFO
25.	Amplifier	1	Unit	DISKOMINFO
25.	Routerboard	4	Buah	DISKOMINFO
26.	HDD Internal	1	Unit	DISKOMINFO

TABEL
JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN

NO	NAMA APLIKASI	FUNGSI APLIKASI	JUMLAH	ONLINE/OFFLINE
1	Email resmi OPD	Surat menyurat elektronik	1 bh	Online
2	Website resmi	Informasi dan Kegiatan OPD	1 bh	Online
3	e-surat	Aplikasi surat menyurat, disposisi, arsip	1 bh	offline
4	SIMPEG	Data kepegawaian	1 bh	Online
5	ELOK/e LAPORAN KEPEGAWAIAN	Sistem aplikasi kepegawaian	1 bh	Online
6	SAKTI	Aplikasi pengelolaan keuangan, akutansi dan aset	1bh	Online
7	e-tracking surat	Untuk menemukan kembali informasi surat masuk keluar	1bh	Offline
8	SIPPD	Upload Musrenbang	1bh	Online
9	SISKA	Sistem informasi usulan Musrenbang Kecamatan	1bh	Online
10	Sistem Aspirasi Warga	Sebagai aplikasi penampung aspirasi warga	1bh	Online
11	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan	Mengelola dan mendokumentasikan data dan informasi laporan	1bh	Online

	Pemerintah Daerah (SIPPD)	penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat SKPD maupun tingkat Kabupaten Lamongan		
12	PATEN	Administrasi terpadu kecamatan	1bh	Offline (rencana online)
13	JDIH	Menampilkan informasi produk tati di Kabupaten Lamongan	1bh	Online
14	Monev Keuangan	Monitoring dan evaluasi realisasi keuangan	1bh	Online
15	Monev Fisik	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1bh	Online
16	SPSE	Aplikasi untuk pengadaan secara elektronik	1bh	Online
17	SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	1bh	Online
18	PADE	Sistem informasi untuk administrasi desa	1bh	Offline
19	SIMKUDES	Sistem informasi administrasi dan keuangan desa	1bh	Offline
20	E-FILING	Laporan SPT Tahunan Pribadi	1bh	Online
21	DB gaji	Administrasi Penggajian	1bh	Offline
22	Lamongan Tour Guide	Untuk informasi tempat pariwisata dan fasilitas publik di Lamongan	1bh	Online
23	ASPAK(Aplikasi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan)	Untuk mengetahui informasi data sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	1bh	Online
24	KOMDAT	Pelaporan data kesehatan	1bh	Online
25	SPM	Pelaporan data SPM secara elektronik	1bh	Online

26	E- Renggar	Pelaporan realisasi dana DAK	1bh	Online
27	SIHA (Sistem Informasi HIV	memudahkan dalam membuat dan melakukan	1bh	offline
28	SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	memudahkan dalam membuat dan melakukan monev program HIV AIDS	1bh	Online
29	E-SISMAL (Program malaria)	memudahkan dalam pencatatan dan monev program malaria	1bh	Offline
30	SIPK (kusta)	memudahkan dalam pencatatan dan monev program kusta	1bh	Offline
31	SITT (Program TB)	memudahkan dalam pencatatan dan monev program TB	1bh	Online
32	Program Pelaporan ISPA	memudahkan dalam pencatatan dan monev program ISPA	1bh	Offline
33	Anjab ABK	Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan melalui metode ABK	1bh	Online
34	Agregat SDM K	Fungsi dan jumlah penyebaran tenaga kesehatan	1bh	Offline
35	SIKDA Generik	Untuk administrasi pelaporan kesehatan	1bh	Online
36	E-MON	Monitoring DAK	1bh	Online
37	SIK	Sistem informasi administrasi kependudukan	1bh	Online
38	PERZELA (Perizinan Elektronik Lamongan)	Pelayanan Perizinan	1bh	Online

39	Aplikasi Arsip Perijinan	untuk manajemen penyimpanan dan pengelolaan arsip dokumen perijinan	1bh	Offline
40	SIMA BMN	Untuk pengelolaan tati perikanan	1bh	
41	GIS Perikanan	Untuk memetakan potensi perikanan budidaya di Lamongan	1bh	Online
42	Edalwas	Untuk evaluasi pengendalian dan pengawasan kegiatan di perikanan	1bh	Online
43	SAIBA	Untuk pelaporan akutansi	1bh	Online
44	Simfoni PPA	Pengiriman data kasus secara online	1bh	Online
45	Aplikasi Tata Naskah Dinas elektronik	Pelayanan administrasi tata naskah dinas yang cepat, efisien dan efektif menuju e-Government	1bh	Online
46	Aplikasi 10 Juta Kesempatan kerja	Mempercepat informasi pasar kerja perusahaan (lowongan pekerjaan) dalam dan luar daerah	1bh	
47	Aplikasi E-AK I	Aplikasi registrasi kartu pencari kerja	1bh	Offline
48	Aplikasi Sistem Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN)	Menginput data CTKI	1bh	Online
49	Sistem Informasi Penyusunan Pelaporan Data Ketenagakerjaan (SIP2DK)	Manajemen pelaporan hasil kegiatan pelatihan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian	1bh	Online

50	Info Kerja Jatim	untuk memberikan informasi lowongan kerja bagi masyarakat	1bh	Online
51	Bank sampah	Sebagai administrasi pengelolaan sampah	1bh	Online
52	GIS Potensi Pencemaran Lingkungan	Menyajikan data spasial potensi pencemaran lingkungan dan tatisti di kab. Lamongan	1bh	Online
53	Aplikasi TPSLB3	Untuk menerbitkan rekomendasi ijin lingkungan	1bh	Online
54	APPEL	input bahan pustaka & Anggota perpustakaan - searching bahan pustaka	1bh	Online
55	SIERKEL	input rencana kerja	1bh	Online
56	E-PBB	Menangani Pajak Bumi Bangunan (PBB)	1bh	Online
57	Sistem Informasi Geografis (SIG)	Peta PBB se Kab Lamongan	1bh	Offline
58	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA)	Menangani Pajak Hotel,Restoran,Hiburan,Pe neran gan jalan, Parkir,Air Tanah,Sarang burung tatis, dan minerba	1bh	Online
59	Sistem informasi manajemen pajak BPHTB (SIM-BPHTB)	Menangani pajak BPHTB	1bh	Online
60	Sistem informasi manajemen pajak reklame (SIM-REKLAME)	Menangani pajak reklame	1bh	Online
61	Survey kepuasan pelanggan	Survey terhadap wajib pajak di Bapenda	1bh	Offline
62	Sistem Informasi manajemen(SIM) Surat	Pengadministrasian surat keluar masuk dan	1bh	Offline

		pengarsipan surat		
63	Sistem Informasi manajemen(SIM) Pustaka Perundangan	Menghimpun data pustaka peraturan perundang-undangan dalam bentuk digital	1bh	Offline
64	Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SIPPMAS)	Mengelola pengaduan masyarakat	1bh	Online
65	Sistem Informasi Pelayanan Informasi Pasar	Laporan informasi harga ternak	1bh	Online
66	ISIKHNAS	Laporan Kesehatan hewan yang terintegrasi secara nasional	1bh	Online
67	E-Proposal	Pengajuan proposal kegiatan/bantuan	1bh	Online
68	Lamongan store	Penjualan online Produk UKM	1bh	Online
69	SIM Billing	Untuk informasi tagihan, daftar pasien, tatisti dan entri obat	1bh	Online (intranet)
70	SIKLUS	Untuk proses pengelolaan dan keuangan BLUD	1bh	Online (intranet)
71	Ina DRG	Untuk penghitungan klaim biaya	1bh	Online (intranet)
72	Aplikasi GIS Proyek	untuk memudahkan stake holder dalam memantau lokasi proyek serta tatisti dari proyek tersebut yang disajikan berbasis GIS (Geographic Information System).	1bh	Online
73	Aplikasi Integrasi e- Planning, ebudgetting dan e-controlling	untuk mengakses informasi, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran serta	1bh	Online

		kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi.		
74	Aplikasi Pelaporan Absensi Online	untuk monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai	1bh	Online
75	Aplikasi Portal Smart City / Silly	memberikan kemudahan akses seluruh layanan aplikasi di Kabupaten Lamongan serta sebagai akses informasi fasilitas dan pelayanan Pemkab Lamongan yang berbasis android.	1bh	Online
76	Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan	Menyediakan Sistem Informasi Potensi Daerah yang disajikan dalam menunjang e-Government	1bh	Online
77	Aplikasi Sistem informasi Statistik	untuk menginformasikan statistik dari potensi-potensi yang ada di kabupaten Lamongan	1bh	Online

TABEL
JUMLAH SARANA PENDUKUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Barang	Jumlah	satuan	Keterangan
1	Handycam	2	Unit	Puskom Kreatif dan DISKOMINFO
2	Camera Digital	2	Unit	DISKOMINFO
3	Hub Switch	11	Unit	Server
4	Wave Lan	7	Unit	DISKOMINFO
5	UPS	5	Unit	Server
6	Printer	29	Unit	Masing-masing Bidang
7	Scaner	3	Unit	TU
8	Lcd Proyektor	2	Unit	DISKOMINFO dan Puskom
9	Dvd Player	1	Unit	Puskom Creative
10	Soundsystem	1	Unit	DISKOMINFO
11	Action Camera Video	2	Unit	DISKOMINFO
12	Lensa Kamera	2	Unit	DISKOMINFO
13	Televisi	1	Unit	Televisi di Diskominfo
14	Loudspeaker	2	Unit	DISKOMINFO
15	Antena	34	Unit	Kecamatan
16	Web Camera	2	Unit	DISKOMINFO
17	LCD Drawer Rackmount	12	Unit	DISKOMINFO (Command Center)
18	Kabel UTP	1106	Meter	DISKOMINFO (Command Center)
19	LED Televisi (Video Wall System)	1	Paket	DISKOMINFO (Media Center)
20	Mikrotik	5	Buah	DISKOMINFO
21	RJ 45	20	Bungkus	DISKOMINFO
22	Server	1	Unit	DISKOMINFO
23	Lain-lain	33	Unit	DISKOMINFO

3). Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 14.373.746.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.124.530.389,00 atau dengan prosentase rata-rata mencapai 98.27%. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2024, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagaimana tabel berikut :

Kode											Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	
														(Rp.)	%
1											2	3	4	5	
2.16	19	00	0.00	00	4						PENDAPATAN DAERAH	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
2.16	19	00	0.00	00	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
2.16	19	00	0.00	00	4	1	02				Retribusi Daerah	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
2.16	19	00	0.00	00	4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
2.16	19	00	0.00	00	4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
2.16	19	00	0.00	00	4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
											JUMLAH PENDAPATAN	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
											BELANJA	14,976,706,948.00	14,336,789,325.00	639,917,623.00	95.73
2.16	19	01									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,266,572,368.00	4,755,636,051.00	510,936,317.00	90.30
2.16	19	01	2.01								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	39,695,500.00	304,500.00	99.24
2.16	19	01	2.01	00							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	9,964,000.00	36,000.00	99.64
2.16	19	01	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	10,000,000.00	9,964,000.00	36,000.00	99.64
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,964,000.00	36,000.00	99.64
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	7,120,000.00	7,084,000.00	36,000.00	99.49

2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	7,120,000.00	7,084,000.00	36,000.00	99.49
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	848,000.00	830,000.00	18,000.00	97.88
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,414,000.00	1,400,000.00	14,000.00	99.01
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	838,000.00	834,000.00	4,000.00	99.52
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,920,000.00	2,920,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	00							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000.00	29,731,500.00	268,500.00	99.11
2.16	19	01	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	30,000,000.00	29,731,500.00	268,500.00	99.11
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	29,731,500.00	268,500.00	99.11
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	5,000,000.00	4,981,500.00	18,500.00	99.63
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5,000,000.00	4,981,500.00	18,500.00	99.63
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	424,000.00	415,000.00	9,000.00	97.88
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,089,000.00	1,080,000.00	9,000.00	99.17
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	567,000.00	566,500.00	500.00	99.91
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,920,000.00	2,920,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	25,000,000.00	24,750,000.00	250,000.00	99.00
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25,000,000.00	24,750,000.00	250,000.00	99.00
2.16	19	01	2.01	00	5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	25,000,000.00	24,750,000.00	250,000.00	99.00
2.16	19	01	2.02								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,296,433,092.00	3,838,514,552.00	457,918,540.00	89.34
2.16	19	01	2.02	00							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,276,433,092.00	3,818,628,552.00	457,804,540.00	89.29

2.16	19	01	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	4,276,433,092.00	3,818,628,552.00	457,804,540.00	89.29
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01				Belanja Pegawai	4,276,433,092.00	3,818,628,552.00	457,804,540.00	89.29
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,082,189,798.00	2,010,506,773.00	71,683,025.00	96.56
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	1,543,166,420.00	1,516,868,152.00	26,298,268.00	98.30
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,543,166,420.00	1,516,868,152.00	26,298,268.00	98.30
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141,615,712.00	137,032,048.00	4,583,664.00	96.76
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141,615,712.00	137,032,048.00	4,583,664.00	96.76
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	177,870,000.00	167,370,000.00	10,500,000.00	94.10
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177,870,000.00	167,370,000.00	10,500,000.00	94.10
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	45,980,000.00	30,920,000.00	15,060,000.00	67.25
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	45,980,000.00	30,920,000.00	15,060,000.00	67.25
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	91,249,200.00	78,792,960.00	12,456,240.00	86.35
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	91,249,200.00	78,792,960.00	12,456,240.00	86.35
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,596,988.00	3,648,405.00	948,583.00	79.37
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,596,988.00	3,648,405.00	948,583.00	79.37
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	50,000.00	23,301.00	26,699.00	46.60
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000.00	23,301.00	26,699.00	46.60
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	64,830,247.00	63,392,178.00	1,438,069.00	97.78
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	64,830,247.00	63,392,178.00	1,438,069.00	97.78
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,232,773.00	3,114,892.00	117,881.00	96.35
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,232,773.00	3,114,892.00	117,881.00	96.35
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9,598,458.00	9,344,837.00	253,621.00	97.36
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9,598,458.00	9,344,837.00	253,621.00	97.36
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,186,443,294.00	1,808,121,779.00	378,321,515.00	82.70
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,186,443,294.00	1,808,121,779.00	378,321,515.00	82.70
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,186,443,294.00	1,808,121,779.00	378,321,515.00	82.70

2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7,800,000.00	-	7,800,000.00	-
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	7,800,000.00	-	7,800,000.00	-
2.16	19	01	2.02	00	5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7,800,000.00	-	7,800,000.00	-
2.16	19	01	2.02	00							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00	9,950,000.00	50,000.00	99.50
2.16	19	01	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	10,000,000.00	9,950,000.00	50,000.00	99.50
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,950,000.00	50,000.00	99.50
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	10,000,000.00	9,950,000.00	50,000.00	99.50
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	10,000,000.00	9,950,000.00	50,000.00	99.50
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,390,000.00	1,380,000.00	10,000.00	99.28
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5,180,000.00	5,140,000.00	40,000.00	99.23
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	510,000.00	510,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,920,000.00	2,920,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	00							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00	9,936,000.00	64,000.00	99.36
2.16	19	01	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	10,000,000.00	9,936,000.00	64,000.00	99.36
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,936,000.00	64,000.00	99.36
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	10,000,000.00	9,936,000.00	64,000.00	99.36
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	10,000,000.00	9,936,000.00	64,000.00	99.36
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8,669,000.00	8,605,000.00	64,000.00	99.26
2.16	19	01	2.02	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,331,000.00	1,331,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06								Administrasi Umum Perangkat Daerah	177,151,100.00	166,424,400.00	10,726,700.00	93.94
2.16	19	01	2.06	00							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1					BELANJA OPERASI	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00

2.16	19	01	2.06	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01			Belanja Barang	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26,000.00	26,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9,974,000.00	9,974,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,568,000.00	10,565,000.00	3,000.00	99.97
2.16	19	01	2.06	00	5	1					BELANJA OPERASI	568,000.00	565,000.00	3,000.00	99.47
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	568,000.00	565,000.00	3,000.00	99.47
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01			Belanja Barang	568,000.00	565,000.00	3,000.00	99.47
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	568,000.00	565,000.00	3,000.00	99.47
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	363,000.00	360,000.00	3,000.00	99.17
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	205,000.00	205,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	2					BELANJA MODAL	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	01	2.06	00	5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	-
2.16	19	01	2.06	00							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,357,700.00	31,186,800.00	170,900.00	99.45
2.16	19	01	2.06	00	5	1					BELANJA OPERASI	31,357,700.00	31,186,800.00	170,900.00	99.45
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	31,357,700.00	31,186,800.00	170,900.00	99.45
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01			Belanja Barang	31,357,700.00	31,186,800.00	170,900.00	99.45
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	31,357,700.00	31,186,800.00	170,900.00	99.45
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,726,400.00	7,677,500.00	48,900.00	99.37

2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13,642,000.00	13,520,000.00	122,000.00	99.11
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	420,000.00	420,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,762,000.00	3,762,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,807,300.00	5,807,300.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,570,400.00	26,570,400.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1					BELANJA OPERASI	26,570,400.00	26,570,400.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	26,570,400.00	26,570,400.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01			Belanja Barang	26,570,400.00	26,570,400.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	26,570,400.00	26,570,400.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26,570,400.00	26,570,400.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,685,000.00	14,280,000.00	1,405,000.00	91.04
2.16	19	01	2.06	00	5	1					BELANJA OPERASI	15,685,000.00	14,280,000.00	1,405,000.00	91.04
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	15,685,000.00	14,280,000.00	1,405,000.00	91.04
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	15,685,000.00	14,280,000.00	1,405,000.00	91.04
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	15,685,000.00	14,280,000.00	1,405,000.00	91.04
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15,685,000.00	14,280,000.00	1,405,000.00	91.04
2.16	19	01	2.06	00							Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,970,000.00	18,875,000.00	95,000.00	99.50
2.16	19	01	2.06	00	5	1					BELANJA OPERASI	18,970,000.00	18,875,000.00	95,000.00	99.50
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	18,970,000.00	18,875,000.00	95,000.00	99.50
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01			Belanja Barang	18,970,000.00	18,875,000.00	95,000.00	99.50
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	18,970,000.00	18,875,000.00	95,000.00	99.50
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	120,000.00	120,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7,850,000.00	7,755,000.00	95,000.00	98.79

2.16	19	01	2.06	00						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,000,000.00	54,947,200.00	9,052,800.00	85.86
2.16	19	01	2.06	00	5	1				BELANJA OPERASI	64,000,000.00	54,947,200.00	9,052,800.00	85.86
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	64,000,000.00	54,947,200.00	9,052,800.00	85.86
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01		Belanja Barang	2,316,000.00	2,316,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2,316,000.00	2,316,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	01	01	0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,316,000.00	2,316,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	04		Belana Perjalanan Dinas	61,684,000.00	52,631,200.00	9,052,800.00	85.32
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61,684,000.00	52,631,200.00	9,052,800.00	85.32
2.16	19	01	2.06	00	5	1	02	04	01	0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61,684,000.00	52,631,200.00	9,052,800.00	85.32
2.16	19	01	2.08							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617,561,100.00	579,901,999.00	37,659,101.00	93.90
2.16	19	01	2.08	00						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,513,100.00	57,576,607.00	17,936,493.00	76.25
2.16	19	01	2.08	00	5	1				BELANJA OPERASI	75,513,100.00	57,576,607.00	17,936,493.00	76.25
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	75,513,100.00	57,576,607.00	17,936,493.00	76.25
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02		Belanja Jasa	75,513,100.00	57,576,607.00	17,936,493.00	76.25
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	75,513,100.00	57,576,607.00	17,936,493.00	76.25
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	01	0059 Belanja Tagihan Telepon	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	01	0060 Belanja Tagihan Air	4,080,000.00	1,838,870.00	2,241,130.00	45.07
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	01	0061 Belanja Tagihan Listrik	69,433,100.00	55,737,737.00	13,695,363.00	80.28
2.16	19	01	2.08	00						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542,048,000.00	522,325,392.00	19,722,608.00	96.36
2.16	19	01	2.08	00	5	1				BELANJA OPERASI	542,048,000.00	522,325,392.00	19,722,608.00	96.36
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	542,048,000.00	522,325,392.00	19,722,608.00	96.36
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02		Belanja Jasa	542,048,000.00	522,325,392.00	19,722,608.00	96.36
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	494,816,000.00	477,826,000.00	16,990,000.00	96.57
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	01	0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	494,816,000.00	477,826,000.00	16,990,000.00	96.57
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47,232,000.00	44,499,392.00	2,732,608.00	94.21

2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	41,760,000.00	40,162,144.00	1,597,856.00	96.17
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,016,000.00	1,927,792.00	88,208.00	95.62
2.16	19	01	2.08	00	5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,456,000.00	2,409,456.00	1,046,544.00	69.72
2.16	19	01	2.09								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135,427,076.00	131,099,600.00	4,327,476.00	96.80
2.16	19	01	2.09	00							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,002,000.00	41,968,000.00	34,000.00	99.92
2.16	19	01	2.09	00	5	1					BELANJA OPERASI	42,002,000.00	41,968,000.00	34,000.00	99.92
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	42,002,000.00	41,968,000.00	34,000.00	99.92
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01			Belanja Barang	42,002,000.00	41,968,000.00	34,000.00	99.92
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	42,002,000.00	41,968,000.00	34,000.00	99.92
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41,828,500.00	41,800,000.00	28,500.00	99.93
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	173,500.00	168,000.00	5,500.00	96.83
2.16	19	01	2.09	00							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73,425,076.00	69,131,600.00	4,293,476.00	94.15
2.16	19	01	2.09	00	5	1					BELANJA OPERASI	73,425,076.00	69,131,600.00	4,293,476.00	94.15
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	73,425,076.00	69,131,600.00	4,293,476.00	94.15
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01			Belanja Barang	23,700,400.00	23,656,000.00	44,400.00	99.81
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	23,700,400.00	23,656,000.00	44,400.00	99.81
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13,694,400.00	13,650,000.00	44,400.00	99.68
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9,264,000.00	9,264,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	742,000.00	742,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	12,524,676.00	8,275,600.00	4,249,076.00	66.07
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	12,524,676.00	8,275,600.00	4,249,076.00	66.07
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12,524,676.00	8,275,600.00	4,249,076.00	66.07
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	37,200,000.00	37,200,000.00	-	100.00

2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,200,000.00	37,200,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37,200,000.00	37,200,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1					BELANJA OPERASI	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5,215,000.00	5,215,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	00	5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3,485,000.00	3,485,000.00	-	100.00
2.16	19	02									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4,685,534,580.00	4,596,557,614.00	88,976,966.00	98.10
2.16	19	02	2.01								Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,685,534,580.00	4,596,557,614.00	88,976,966.00	98.10
2.16	19	02	2.01	00							Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	120,000,000.00	119,372,400.00	627,600.00	99.48
2.16	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	115,748,000.00	115,120,400.00	627,600.00	99.46
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	115,748,000.00	115,120,400.00	627,600.00	99.46
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	7,548,000.00	7,420,000.00	128,000.00	98.30
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	7,548,000.00	7,420,000.00	128,000.00	98.30
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	738,200.00	734,000.00	4,200.00	99.43
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,669,800.00	1,656,000.00	13,800.00	99.17
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	110,000.00	-	110,000.00	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	2,280,000.00	2,280,000.00	-	100.00

											Komputer				
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,750,000.00	2,750,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	100,000,000.00	99,500,400.00	499,600.00	99.50
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100,000,000.00	99,500,400.00	499,600.00	99.50
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100,000,000.00	99,500,400.00	499,600.00	99.50
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	8,200,000.00	8,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8,200,000.00	8,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,200,000.00	8,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	2					BELANJA MODAL	4,252,000.00	4,252,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,252,000.00	4,252,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	4,252,000.00	4,252,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	4,252,000.00	4,252,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4,252,000.00	4,252,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00							Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100,000,000.00	99,287,188.00	712,812.00	99.29
2.16	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	100,000,000.00	99,287,188.00	712,812.00	99.29
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	99,287,188.00	712,812.00	99.29
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	10,351,000.00	10,328,000.00	23,000.00	99.78
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	10,351,000.00	10,328,000.00	23,000.00	99.78
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2,503,000.00	2,480,000.00	23,000.00	99.08
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,098,000.00	5,098,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,750,000.00	2,750,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	84,729,000.00	84,039,188.00	689,812.00	99.19
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	1,233,188.00	266,812.00	82.21
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	1,500,000.00	1,233,188.00	266,812.00	82.21

2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	83,229,000.00	82,806,000.00	423,000.00	99.49
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	83,229,000.00	82,806,000.00	423,000.00	99.49
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	4,920,000.00	4,920,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,920,000.00	4,920,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,920,000.00	4,920,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2,291,534,580.00	2,214,121,246.00	77,413,334.00	96.62
2.16	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	2,128,873,580.00	2,108,786,246.00	20,087,334.00	99.06
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	2,128,873,580.00	2,108,786,246.00	20,087,334.00	99.06
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	1,339,000.00	1,330,000.00	9,000.00	99.33
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,339,000.00	1,330,000.00	9,000.00	99.33
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,089,000.00	1,080,000.00	9,000.00	99.17
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	250,000.00	250,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	04		Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	04	0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Alat Studio Lainnya	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	2,127,534,580.00	2,107,456,246.00	20,078,334.00	99.06
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	2,127,534,580.00	2,107,456,246.00	20,078,334.00	99.06
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17,500,000.00	-	17,500,000.00	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	186,000,000.00	186,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,918,534,580.00	1,915,956,246.00	2,578,334.00	99.87
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-

2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	2					BELANJA MODAL	162,661,000.00	105,335,000.00	57,326,000.00	64.76
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107,328,050.00	105,335,000.00	1,993,050.00	98.14
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	68,750,000.00	68,085,000.00	665,000.00	99.03
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	68,750,000.00	68,085,000.00	665,000.00	99.03
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	68,750,000.00	68,085,000.00	665,000.00	99.03
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	38,578,050.00	37,250,000.00	1,328,050.00	96.56
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	38,578,050.00	37,250,000.00	1,328,050.00	96.56
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	38,578,050.00	37,250,000.00	1,328,050.00	96.56
2.16	19	02	2.01	00	5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,332,950.00	-	55,332,950.00	-
2.16	19	02	2.01	00	5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung	55,332,950.00	-	55,332,950.00	-
2.16	19	02	2.01	00	5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	55,332,950.00	-	55,332,950.00	-
2.16	19	02	2.01	00	5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	55,332,950.00	-	55,332,950.00	-
2.16	19	02	2.01	00							Pelayanan Informasi Publik	130,000,000.00	129,554,000.00	446,000.00	99.66
2.16	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	130,000,000.00	129,554,000.00	446,000.00	99.66
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	130,000,000.00	129,554,000.00	446,000.00	99.66
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	740,000.00	737,000.00	3,000.00	99.59
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	740,000.00	737,000.00	3,000.00	99.59
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	363,000.00	360,000.00	3,000.00	99.17
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	263,000.00	263,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	114,000.00	114,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	126,800,000.00	126,357,000.00	443,000.00	99.65
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	16,800,000.00	16,800,000.00	-	100.00

2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,800,000.00	16,800,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	110,000,000.00	109,557,000.00	443,000.00	99.60
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	110,000,000.00	109,557,000.00	443,000.00	99.60
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	2,460,000.00	2,460,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,460,000.00	2,460,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,460,000.00	2,460,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	20,000,000.00	19,984,500.00	15,500.00	99.92
2.16	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	20,000,000.00	19,984,500.00	15,500.00	99.92
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	19,984,500.00	15,500.00	99.92
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	1,900,000.00	1,884,500.00	15,500.00	99.18
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,900,000.00	1,884,500.00	15,500.00	99.18
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	178,500.00	175,000.00	3,500.00	98.04
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,452,000.00	1,440,000.00	12,000.00	99.17
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	269,500.00	269,500.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	05	0043	Belanja Sewa Hotel	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	4,100,000.00	4,100,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,100,000.00	4,100,000.00	-	100.00

2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,100,000.00	4,100,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2,024,000,000.00	2,014,238,280.00	9,761,720.00	99.52
2.16	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	1,993,947,000.00	1,984,776,280.00	9,170,720.00	99.54
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	1,993,947,000.00	1,984,776,280.00	9,170,720.00	99.54
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	162,386,500.00	160,309,200.00	2,077,300.00	98.72
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	162,386,500.00	160,309,200.00	2,077,300.00	98.72
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,472,000.00	1,422,000.00	50,000.00	96.60
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5,082,000.00	5,040,000.00	42,000.00	99.17
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	151,614,500.00	149,629,200.00	1,985,300.00	98.69
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,218,000.00	4,218,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	1,825,000,500.00	1,817,907,080.00	7,093,420.00	99.61
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	1,825,000,500.00	1,817,907,080.00	7,093,420.00	99.61
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108,000,000.00	108,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1,717,000,500.00	1,709,907,080.00	7,093,420.00	99.59
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	6,560,000.00	6,560,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,560,000.00	6,560,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,560,000.00	6,560,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	2					BELANJA MODAL	30,053,000.00	29,462,000.00	591,000.00	98.03
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,053,000.00	29,462,000.00	591,000.00	98.03
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30,053,000.00	29,462,000.00	591,000.00	98.03
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	30,053,000.00	29,462,000.00	591,000.00	98.03
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1,527,000.00	1,527,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	00	5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28,526,000.00	27,935,000.00	591,000.00	97.93
2.16	19	03									PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4,620,000,000.00	4,590,970,900.00	29,029,100.00	99.37

2.16	19	03	2.01								Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,555,000,000.00	3,553,678,000.00	1,322,000.00	99.96
2.16	19	03	2.01	00							Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3,555,000,000.00	3,553,678,000.00	1,322,000.00	99.96
2.16	19	03	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	3,555,000,000.00	3,553,678,000.00	1,322,000.00	99.96
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	3,555,000,000.00	3,553,678,000.00	1,322,000.00	99.96
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	204,080,000.00	204,033,000.00	47,000.00	99.98
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	7,330,000.00	7,330,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,452,000.00	1,452,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,958,000.00	2,958,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,920,000.00	2,920,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	01	04		Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	196,750,000.00	196,703,000.00	47,000.00	99.98
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	01	04	0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	196,750,000.00	196,703,000.00	47,000.00	99.98
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	2,922,380,000.00	2,922,380,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	2,916,380,000.00	2,916,380,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,916,380,000.00	2,916,380,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	02	03		Belanja Sewa Tanah	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	02	03	0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	405,500,000.00	404,225,000.00	1,275,000.00	99.69
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	405,500,000.00	404,225,000.00	1,275,000.00	99.69
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	405,500,000.00	404,225,000.00	1,275,000.00	99.69
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	23,040,000.00	23,040,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23,040,000.00	23,040,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,040,000.00	23,040,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02								Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah	1,065,000,000.00	1,037,292,900.00	27,707,100.00	97.40

											Daerah Kabupaten/Kota				
2.16	19	03	2.02	00							Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000.00	14,997,000.00	3,000.00	99.98
2.16	19	03	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	15,000,000.00	14,997,000.00	3,000.00	99.98
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	14,997,000.00	3,000.00	99.98
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	3,901,000.00	3,898,000.00	3,000.00	99.92
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	3,901,000.00	3,898,000.00	3,000.00	99.92
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	726,000.00	726,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	806,000.00	806,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000.00	297,000.00	3,000.00	99.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	419,000.00	419,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	9,599,000.00	9,599,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9,599,000.00	9,599,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,599,000.00	9,599,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00							Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	375,000,000.00	374,763,000.00	237,000.00	99.94
2.16	19	03	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	375,000,000.00	374,763,000.00	237,000.00	99.94
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	375,000,000.00	374,763,000.00	237,000.00	99.94
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	292,298,000.00	292,088,000.00	210,000.00	99.93
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	7,298,000.00	7,298,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,452,000.00	1,452,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,926,000.00	2,926,000.00	-	100.00

2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,920,000.00	2,920,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	04		Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	285,000,000.00	284,790,000.00	210,000.00	99.93
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	04	0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-AlatStudio-Alat Studio Lainnya	105,000,000.00	104,895,000.00	105,000.00	99.90
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	04	0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	110,000,000.00	109,995,000.00	5,000.00	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	04	0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-PeralatanJaringan	70,000,000.00	69,900,000.00	100,000.00	99.86
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	82,702,000.00	82,675,000.00	27,000.00	99.97
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82,702,000.00	82,675,000.00	27,000.00	99.97
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03	02	0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	32,702,000.00	32,700,000.00	2,000.00	99.99
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	50,000,000.00	49,975,000.00	25,000.00	99.95
2.16	19	03	2.02	00							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	500,000,000.00	497,781,900.00	2,218,100.00	99.56
2.16	19	03	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	500,000,000.00	497,781,900.00	2,218,100.00	99.56
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	500,000,000.00	497,781,900.00	2,218,100.00	99.56
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	8,800,000.00	8,800,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	8,800,000.00	8,800,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,800,000.00	8,800,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	470,320,000.00	468,101,900.00	2,218,100.00	99.53
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	235,320,000.00	235,124,000.00	196,000.00	99.92
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,400,000.00	50,400,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	184,920,000.00	184,724,000.00	196,000.00	99.89
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	235,000,000.00	232,977,900.00	2,022,100.00	99.14
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	235,000,000.00	232,977,900.00	2,022,100.00	99.14

2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	15,600,000.00	15,600,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,600,000.00	15,600,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15,600,000.00	15,600,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	5,280,000.00	5,280,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,280,000.00	5,280,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,280,000.00	5,280,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00							Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	150,000,000.00	141,272,000.00	8,728,000.00	94.18
2.16	19	03	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	150,000,000.00	141,272,000.00	8,728,000.00	94.18
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	150,000,000.00	141,272,000.00	8,728,000.00	94.18
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	413,000.00	413,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	413,000.00	413,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	363,000.00	363,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50,000.00	50,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	141,417,000.00	140,859,000.00	558,000.00	99.61
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	141,417,000.00	140,859,000.00	558,000.00	99.61
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	91,250,000.00	90,853,500.00	396,500.00	99.57
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50,167,000.00	50,005,500.00	161,500.00	99.68
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	8,170,000.00	-	8,170,000.00	-
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8,170,000.00	-	8,170,000.00	-
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,170,000.00	-	8,170,000.00	-
2.16	19	03	2.02	00							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	25,000,000.00	8,479,000.00	16,521,000.00	33.92
2.16	19	03	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	25,000,000.00	8,479,000.00	16,521,000.00	33.92
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	8,479,000.00	16,521,000.00	33.92
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	8,660,000.00	8,479,000.00	181,000.00	97.91

2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	8,660,000.00	8,479,000.00	181,000.00	97.91
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	726,000.00	726,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,831,000.00	6,700,000.00	131,000.00	98.08
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,003,000.00	1,003,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	16,340,000.00	-	16,340,000.00	-
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16,340,000.00	-	16,340,000.00	-
2.16	19	03	2.02	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,340,000.00	-	16,340,000.00	-
2.20	19	02									PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	354,600,000.00	353,165,498.00	1,434,502.00	99.60
2.20	19	02	2.01								Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	354,600,000.00	353,165,498.00	1,434,502.00	99.60
2.20	19	02	2.01	00							Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	229,600,000.00	228,727,558.00	872,442.00	99.62
2.20	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	229,600,000.00	228,727,558.00	872,442.00	99.62
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	229,600,000.00	228,727,558.00	872,442.00	99.62
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	9,480,000.00	9,471,000.00	9,000.00	99.91
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	9,480,000.00	9,471,000.00	9,000.00	99.91
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81,400.00	79,000.00	2,400.00	97.05
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	798,600.00	792,000.00	6,600.00	99.17
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	138,000.00	138,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	110,000.00	110,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,752,000.00	1,752,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,600,000.00	6,600,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	213,010,000.00	212,396,058.00	613,942.00	99.71
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	213,010,000.00	212,396,058.00	613,942.00	99.71

2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	213,010,000.00	212,396,058.00	613,942.00	99.71
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	7,110,000.00	6,860,500.00	249,500.00	96.49
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,110,000.00	6,860,500.00	249,500.00	96.49
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,110,000.00	6,860,500.00	249,500.00	96.49
2.20	19	02	2.01	00							Membangun Metadata Statistik Sektoral	125,000,000.00	124,437,940.00	562,060.00	99.55
2.20	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	125,000,000.00	124,437,940.00	562,060.00	99.55
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	125,000,000.00	124,437,940.00	562,060.00	99.55
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	5,440,000.00	5,430,100.00	9,900.00	99.82
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5,440,000.00	5,430,100.00	9,900.00	99.82
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	266,500.00	262,600.00	3,900.00	98.54
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	726,000.00	720,000.00	6,000.00	99.17
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	167,500.00	167,500.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	70,000.00	70,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,460,000.00	1,460,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,750,000.00	2,750,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	115,000,000.00	114,837,840.00	162,160.00	99.86
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100,000,000.00	99,837,840.00	162,160.00	99.84
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100,000,000.00	99,837,840.00	162,160.00	99.84
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	4,560,000.00	4,170,000.00	390,000.00	91.45
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,560,000.00	4,170,000.00	390,000.00	91.45
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,280,000.00	2,890,000.00	390,000.00	88.11
2.20	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,280,000.00	1,280,000.00	-	100.00
2.21	19	02									PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	50,000,000.00	40,459,262.00	9,540,738.00	80.92

											PENGAMANAN INFORMASI				
2.21	19	02	2.01								Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	21,693,070.00	3,306,930.00	86.77
2.21	19	02	2.01	00							Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25,000,000.00	21,693,070.00	3,306,930.00	86.77
2.21	19	02	2.01	00	5	1					BELANJA OPERASI	25,000,000.00	21,693,070.00	3,306,930.00	86.77
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	21,693,070.00	3,306,930.00	86.77
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	01			Belanja Barang	1,942,000.00	1,930,000.00	12,000.00	99.38
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,942,000.00	1,930,000.00	12,000.00	99.38
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,452,000.00	1,440,000.00	12,000.00	99.17
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10,000.00	10,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480,000.00	480,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	14,500,000.00	14,500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	14,500,000.00	14,500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,500,000.00	14,500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	8,558,000.00	5,263,070.00	3,294,930.00	61.50
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8,558,000.00	5,263,070.00	3,294,930.00	61.50
2.21	19	02	2.01	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,558,000.00	5,263,070.00	3,294,930.00	61.50
2.21	19	02	2.02								Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	18,766,192.00	6,233,808.00	75.06
2.21	19	02	2.02	00							Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	18,766,192.00	6,233,808.00	75.06
2.21	19	02	2.02	00	5	1					BELANJA OPERASI	25,000,000.00	18,766,192.00	6,233,808.00	75.06
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	18,766,192.00	6,233,808.00	75.06
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	01			Belanja Barang	1,400,000.00	1,391,500.00	8,500.00	99.39
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,400,000.00	1,391,500.00	8,500.00	99.39
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51,800.00	50,500.00	1,300.00	97.49

2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	871,200.00	864,000.00	7,200.00	99.17
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	117,000.00	117,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360,000.00	360,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	-
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	02			Belanja Jasa	9,380,000.00	9,380,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	9,380,000.00	9,380,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	14,220,000.00	7,994,692.00	6,225,308.00	56.22
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14,220,000.00	7,994,692.00	6,225,308.00	56.22
2.21	19	02	2.02	00	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,220,000.00	7,994,692.00	6,225,308.00	56.22
											JUMLAH BELANJA	14,976,706,948.00	14,336,789,325.00	639,917,623.00	95.73
											SURPLUS / DEFISIT	(14,776,706,948.00)	(14,336,789,325.00)	(439,917,623.00)	97.02
											SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(14,776,706,948.00)	(14,336,789,325.00)	(439,917,623.00)	97.02

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP TAHUN 2024

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan
2. Sasaran dan Indikator Sasaran

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Program dan Kegiatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pencapaian Kinerja

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja.d Akhir Periode RPJMD/
RENSTRA

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

A.5 Analisa Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

A.6 Analisa Atasn Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Pencapaian Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2021-2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Lampiran lainnya, (penghargaan, Inovasi dll.)

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB 2

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Kemudian Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas KOMINFO Kabupaten Lamongan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi dan Misi

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka visi Kabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
- 2) **Kejayaan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
- 3) **Berkeadilan** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :

1. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan, meningkatkan pengetahuan industry kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
2. **Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berahklak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman** dengan maksud bahwa misi ini

dimaksudkan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.

3. **Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.
4. **Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius, Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tentram** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.
5. **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam **misi 5** yaitu: ***Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.***

1. Tujuan

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan

“Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik governance (e-GOV)”

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra tahun (2021– 2026), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya implementasi e-GOV

Indikator Kinerja : Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi

2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Diskominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik governance (e-GOV)	Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan tahun 2024 terdiri dari 2 sasaran yaitu Meningkatnya implementasi e-GOV dengan indikator kinerja, Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi dan Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	63%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	87.79

Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program dan kegiatan :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Urusan Statistik diimplementasikan melalui program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorol
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektorol di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektor

Urusan Persandian diimplementasikan melalui program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi Jalin Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga mengandung arti suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki tujuan khusus antara lain :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Akuntabilitas Kinerja

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kinerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Komunikasi dan Informatika serta pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

A.1 PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	63%	64,38%	102,2%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	87,79	-	-

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran 1 yaitu Meningkatkan implementasi e-GOV dengan indikator Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi terealisasi sebesar 64,38% dari target 63% dengan capaian 102,2%.

Sasaran 2 yaitu Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo menunggu hasil dari penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.

A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

- Perbandingan Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
			2023	2024
Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	63%	58,90%	64,38%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	87,79	87,82	-

Dari tabel yang membandingkan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi pada sasaran ke-1 dengan indikator Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan sasaran ke-2 dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo pada tahun 2024 menunggu hasil dari penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.

A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	63%	64,38%	73,55%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	87,79	-	87,81

Dari tabel yang membandingkan tahun 2024 dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA dapat dilihat bahwa realisasi pada sasaran ke-1 dengan indikator Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi tercapai 64,38% dengan target akhir periode RPJMD/RENSTRA 73.55% dan pada sasaran ke-2 dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo pada tahun 2024 menunggu hasil dari penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.

A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sasaran pada diskominfo kabupaten lamongan apabila di bandingkan dengan sasaran yang ada pada Kemenkominfo terlihat pada table di bawah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2024	Nasional	2024	Nasional
Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	63%		64,38%	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	87,79		-	

Target kabupaten lamongan di bidang komunikasi dan informatika yaitu Indeks SPBE pada 2024 nilai SPBE Kabupaten Lamongan adalah 4.18. Sedangkan Indeks SPBE Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah 4.75.

A.5 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Realisasi sasaran 1 dengan indikator Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi tahun 2024 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 64,38% dari target sebesar 63% dengan persentase capaian sebesar 102,2%. Hal ini di dukung oleh OPD yang telah terintegrasi diantaranya : RSUD SUGIRI, Bag. Pemerintahan, Disduk Pencapil, Dinas PPKB, BAPPELITBANGDA, BPKAD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian PBJ, Dinas PMD, Bagian Pembangunan, BKPSDM, Diskominfo, Bappenda, DPMPSTSP, Dinkes, Disperindag, Dinas Perikanan, Disparbud, Dinkop, Bag. Hukum, Disnaker, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan, Bag. Organisasi, Dinas PPKB, Inspektorat, Dishub, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Kecamatan Brondong, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kembangbahu, Dinsos, Kecamatan Sambeng, PU PERKIM, PU SDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, Sekretariat DPRD, RSUD Ngimbang, Bagian Kerja Sama, BPBD.
2. Realisasi sasaran 2 dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Diskominfo tahun 2024 menunggu hasil dari penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.

A.6 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	102,2%	98,67%	3,53%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	-	95,73%	-

Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada :

1. Sasaran 1 dengan indikator Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi tingkat efisiensi sebesar **3,53%** karena persentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 102,2% sedangkan persentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 98,67%.
2. Sasaran 2 dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo menunggu hasil dari penilaian dari Inspektorat Kabupaten Lamongan.

A.7 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja pada Dinas komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan indikator sasaran Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi dan Nilai SAKIP Diskominfo, yang dalam pencapaiannya di tunjang oleh program dan kegiatan sekertariat serta tiga bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti dijelaskan ditabel di bawah ini

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
1.	Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	102,2%	Program Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
				Program Aplikasi dan Informatika
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
				Membangun Metadata Statistik Sektoral
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				Operasionalisasi Jarin Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Manajemen Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2024

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	REALISASI						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Indeks SPBE	Penilaian Kemenpan RB	Peringkat 4 Indeks SPBE (3.11)	Peringkat 3 Indeks SPBE (3.40)	Indeks SPBE (3.50) Penilaian Mandiri	Peringkat 2 Indeks SPBE (3.32)	Indeks SPBE (2.82)	Indeks SPBE (3.96)	Indeks SPBE (4.18)

CATATAN:

- ❖ Sejak tahun 2018 penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) ditiadakan dan diganti dengan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga sejak tahun 2018 target dan capaian RPJMD dari yang semula peringkat menjadi Indeks. Hal ini semampang dengan adanya komitmen antara Kemenpan dan Kemenkominfo untuk mengalihkan penilaian pemeringkatan e-GOV menjadi SPBE, yang dalam hal ini wewenang penilaian beralih dari Kemenkominfo ke Kemenpan RB sesuai dengan Permenpan RB no. 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE.
- ❖ Realisasi dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018 terealisasi Indeks SPBE 3.11 (Peringkat 4). Pada tahun 2019 terealisasi Indeks SPBE 3.40, dengan Indeks SPBE tingkat Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan menduduki peringkat 3, sedangkan Indeks SPBE tingkat Nasional Kabupaten Lamongan menduduki Peringkat 12.
- ❖ Kemenpan RB dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid, hanya bisa melakukan evaluasi pada 131 K/L/D/I saja tidak semuanya, dan dipilih yang Indeks SPBE nya belum masuk kategori “BAIK”, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerapan SPBE pada K/L/D/I yang Indeks SPBE nya belum “BAIK” sedangkan Lamongan Indeks SPBE di tahun 2019 sudah 3.40 sehingga masuk dalam kategori “BAIK”. Dan disarankan untuk tetap melakukan evaluasi/penilaian mandiri.
- ❖ Penilaian mandiri yang dilakukan Diskominfo pada tahun 2020 dengan realisasi Indeks SPBE 3.50, dengan mengacu pada 3 Domain (Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola, Domain Layanan SPBE) dan 7 Aspek (Kebijakan tata kelola SPBE, Kebijakan Layanan SPBE, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, TIK, Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik) penilaian.
- ❖ Realisasi dan capaian kinerja RPJMD tahun 2021 terealisasi Indeks SPBE 3.32 (Peringkat 2), dengan Indeks SPBE tingkat Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan menduduki peringkat 2, sedangkan Indeks SPBE tingkat Nasional Kabupaten Lamongan menduduki Peringkat 10.
- ❖ Realisasi dan capaian kinerja RPJMD tahun 2022 terealisasi Indeks SPBE 2.82.
- ❖ Realisasi dan capaian kinerja RPJMD tahun 2022 terealisasi Indeks SPBE 3.96.
- ❖ Realisasi dan capaian kinerja RPJMD tahun 2024 terealisasi Indeks SPBE 4.18 atau menunjukkan capaian 121.16%.

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. **8.603.252.000,00,-** dan terealisasi sebesar Rp. 8.502.880.026,00,- atau **98.83%**. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Kegiatan	Sebelum PAK	Setelah PAK	Realisasi	%	Sisa
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.685.534.580,00	4.596.557.614,00	2.566.272.246,00	98,12%	88.238.766,00
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.555.000.000,00	3.553.678.000,00	781.820.000,00	99,96%	1.322.000,00
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	1.037.292.900,00	552.661.400,00	97,40%	27.707.100,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	354.600.000,00	353.165.498,00	220.341.360,00	99,60%	1.434.502,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	21.693.070,00	3.163.100,00	86,77%	3.306.930,00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	18.766.192,00	17.926.192,00	75,06%	6.233.808,00
J U M L A H	8.660.134.580,00	8.603.252.000,00	8.502.880.026,00	98.83%	100.371.974,00

Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per indikator sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika dari total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada PD.

Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	8.603.252.000	59.86%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	5.770.494.600	40.14%

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika per indikator sasaran dijabarkan dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	63%	64.38%	102.2%	8.603.252.000	8.502.880.026	98.83%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	87.79	84.43	-	5.770.494.600	5.621.650.363	97.42%

P e n u t u p

BAB 4

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan **Sangat Berhasil** karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan baik, Keberhasilan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya pada pengembangan e-goverment di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh SKPD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

4.2 SARAN

Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang ini maka perlu :

1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.
3. Melakukan inovasi tanpa henti di bidang teknologi guna menjawab tantangan globalisasi

Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Dari tahun 2018 hingga 2021 Lamongan masuk dalam gerakan menuju 100 Smart City tingkat Nasional dan di tahun 2019 menempati peringkat 12 dari 75 Kabupaten/Kota se-Indonesia

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggambarkan capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN**



SUGENG WIDODO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681219 198903 1 004

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran : Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah Jumlah informasi publik yang tersampaikan	Rupiah informasi	4.685.534.580,00 2200	4.596.557.614,00 2712	98.10 123.27	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rupiah Dokumen	119.261.800,00 4	119.372.400, 4	100,09 100	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rupiah Dokumen	100.000.000,00 4	99.287.188,00 4	99,29 100	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> :	Rupiah	2.291.534.580,00	2.214.121.246,00	96,62	

		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	4	4	100	
	Pelayanan Informasi Publik	<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	130.000.000,00	129.554.000,00	99,66	
		<u>Output :</u> Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	4	4	100	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	20.000.000,00	19.984.500,00	99,92	
		<u>Output :</u> Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	4	4	100	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	2.024.000.000,00	2.014.238.280,00	99,52	
		<u>Output :</u> Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	4	4	100	
Program Aplikasi dan Informasi	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	3.555.000.000,00	3.553.678.000,00	99,96	
		<u>Output :</u> Jumlah PD yang telah menggunakan domain dan sub domain resmi	PD	13	13	100	

	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rupiah Unit	3.555.000.000,00 475	3.553.678.000,00 475	99,96 100	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah OPD yang e-GOV nya terintegrasi	Rupiah OPD	1.065.000.000,00 4	1.037.292.900,00 4	97,40 100	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah Dokumen	15.000.000,00 4	14.997.000,00 4	99,98 100	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Rupiah Unit	375.000.000,00 4	374.763.000,00 4	99,94 100	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Rupiah Unit	500.000.000,00 3	497.781.900,00 3	99,56 100	

		Elektronik yang Dikembangkan					
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Rupiah	150.000.000,00	141.272.000,00	94,18	
			Dokumen	1	1	100	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rupiah	25.000.000,00	8.479.000,00	33,92	
			Dokumen	1	1	100	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan	Rupiah	354.600.000,00	353.165.498,00	99,60	
			Data	4.000	5.883	147	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	Rupiah	229.600.000,00	228.727.558,00	99,62	
			Orang	160	160	100	

		Terintegrasi					
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rupiah	125.000.000,00	124.437.940,00	99,55	
			Dokumen	1	1	100	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Informasi layanan sistem elektronik yang telah diamankan	Rupiah	25.000.000,00	21.693.070,00	86,77	
			Informasi	1	1	100	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rupiah	25.000.000,00	21.693.070,00	86,77	
			Laporan	12	12	100	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah PD yang melakukan tata kelola persandian	Rupiah	25.000.000,00	18.766.192,00	75,06	
			PD	5	5	100	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Rupiah	25.000.000,00	18.766.192,00	75,06	
			PD	73	73	100	

RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2021 S.D 2026

Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN

Visi : " Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Ket
Uraian		Indikator	Kebijakan	Program	
Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik governance (e-GOV)	Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi	- Menerapkan konsep pelayanan informasi satu pintu/single window, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik - Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya. - Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

DEKOR STAND JATIM DIGIFEST TUBAN 2024



**PEMBUATAN VIDEO PRIORITAS KAB. LAMONGAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN
KEMITRAAN KOMUNITAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN
TAHUN 2024**



**PEMBUATAN VIDEO PROFIL KAB. LAMONGAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN
KEMITRAAN KOMUNITAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN
TAHUN 2024**



BIMTEK SPBE



DESK OPERATOR SDI



DESK VERIFIKATOR SDI



PENILAIAN STATISTIK INTERNAL



REVIEW STATISTIK SEKTORAL

